

**DETERMINAN PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGHELAPAN  
PAJAK (*Tax Evasion*)  
(Studi Pada Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Oleh:**

**FITRIA RISKI ROHMAWATI**  
**B 200 130 113**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**DETERMINAN PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGHELAPAN**  
**PAJAK (*TAX EVASION*)**  
**(Studi Pada Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Oleh

**FITRIA RISKI ROHMAWATI**

**B 200 130 113**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**Dra. Mujiyati, M.Si**  
**NIK/NIDN 0610056605**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**DETERMINAN PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN**  
**PAJAK (*TAX EVASION*)**  
**(Studi Pada Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

Yang ditulis oleh :

**FITRIA RISKI ROHMAWATI**

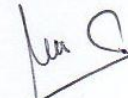
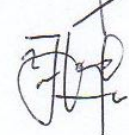

**B 200 130 113**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jumat, 07 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Dewan Penguji:

1. Dra. Mujiyati, M.Si.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Nursiam, M.H., Akt., CA  
(Anggota dewan penguji 1)
3. Dr. Triyono, S.E., M.Si.  
(Anggota Dewan Penguji 2)

(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE., M.Si.)  
NIK.643/0614086801

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidaksamaan dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 April 2017

Penulis



Fitria Riski Rohmawati

B 200 130 113

**DETERMINAN PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGHELAPAN  
PAJAK (*Tax Evasion*)  
(Studi Pada Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mengenai etika atas penghelapan pajak (*tax evasion*). Jumlah sampel dalam penelitian adalah 84 dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dengan metode *convenience sampling*. Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan program SPSS 17. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap etika penghelapan pajak, sedangkan variabel keadilan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap etika penghelapan pajak.

**Kata Kunci:** persepsi etika, penghelapan pajak (*tax evasion*), keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, diskriminasi.

**ABSTRACT**

*This study is aimed to examine the factors influencing the ethical perception towards tax evasion. The number of samples in the study were 84 lecturer at Muhammadiyah University of Surakarta. The sampling technique in the study by convenience sampling method. Analysis of the data in this study aided by using SPSS 17. The method of data analysis used is multiple linear regression. The results showed that the variables of the tax system, taxes and service quality discrimination significant effect on the ethics of tax evasion, while the equity variable has no effect and no significant effect on the ethics of tax evasion.*

**Keywords:** *ethics perception, tax evation, fairness, taxation systems, the quality of tax service, discrimination.*

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang salah satu pendapatannya adalah Pajak. Tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu tentang data penerimaan pajak dalam negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009-2012. Untuk itu, meskipun penerimaan pajak dari tahun ke

tahun semakin meningkat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan definisi pajak, maka setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam memakmurkan masyarakat. Namun bagi wajib pajak, pajak merupakan sebuah biaya atau beban karena akan mengurangi penghasilan yang diterimanya. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), berdasarkan data hasil olahan Direktorat Jendral Pajak (Sultoni, 2013)

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang Ulfa (2015).

Penggelapan pajak sering terjadi di Indonesia. Mughal (2012) dalam Resikno, Rini dan Novitasari (2014) ada 10 (sepuluh) alasan orang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak, diantaranya tidak adanya moralitas pajak, tarif pajak, kurangnya penegak hukum, kurangnya insentif pajak, sistem pajak

yang kurang adil dan efisien, tidak adanya sosialisasi, kurangnya hubungan antara wajib pajak dan pemerintah, kemiskinan, dan proliferasi pajak. Salah satu kasus yang sempat ramai di Indonesia dalam berita adalah kasus Gayus Tambunan (PNS golongan IIIA, Direktorat Jendral Pajak, Kementrian Keuangan) dan Suwir Laut. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus dan Suwir Laut dapat memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Widodo, 2010:5 dalam Silaen, 2015)

Dalam penelitian McGee, et.al (2008) menunjukkan bahwa meskipun pandangan penggelapan pajak etis dilakukan, tetapi ada juga yang kuat merasa bahwa penggelapan pajak itu tidak etis untuk dilakukan dalam beberapa kasus. Penelitian pada siswa AS menemukan rata-rata penggelapan pajak kurang diterima karena mereka percaya bahwa penggelapan pajak salah secara moral sedangkan siswa Hong Kong mereka membenarkan penggelapan pajak karena alasan pemerintah yang korupsi dan penggunaan yang tidak adil dari uang yang dikumpulkan.

Penelitian mengenai determinan persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu diantaranya Ningsih dan Pusposari (2014), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Elmiza, Fauziati, dan Yunilma (2014), Silaen (2015), Tobing (2015), Handayani dan Cahyonowati (2014), Abrahams dan Kristanto (2016), Rachmadi dan Zulaikha (2014). Tujuan penelitian ini untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) pada dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta yang bersedia mengisi kuesioner.

Pemilihan sampel menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan senang hati bersedia memberikannya (Sekaran, 2006:136) dalam (Tobing, 2015)

Dalam menentukan ukuran sampel, penelitian ini menggunakan rumus Slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang akan diambil. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Arikunto, 2004) dalam (Rachmadi dan Zulaikha, 2014):

$$n = \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$$

Dimana:

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$moe$  = *margin of error max*, tingkat kesalahan yang masih ditoleransi, (diambil 10%)

Berdasarkan data dari BPSDM total dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta tercatat sebanyak 534 orang. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan persen kelonggaran sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{534}{1 + 534(10\%)^2}$$

$$n = 84,23$$

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 84 orang dosen yang bersedia di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **2.2. Definisi dan Operasional Variabel**

### **2.2.1. Variabel Dependen**

#### **2.2.2.1. Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak**

Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (PEPP) adalah menurut McGee (2006) dalam Ningsih dan Pusposari (2014) pada penelitiannya menemukan penggelapan pajak tidak etis, namun ada beberapa mengatakan penggelapan pajak kadang-kadang dipandang etis atau bahkan selalu etis. Pandangan tersebut tentunya dilandasi oleh alasan-alasan dan fenomena yang ada di masyarakat. Indikator 1) Tarif pajak terlalu tinggi, 2) Tidak digunakan untuk



keperluan umum negara, 3) Saya tidak merasakan manfaatnya, 4) Dilakukan karena lemahnya hukuman, 5) Terdapat diskriminasi, 6) Pemerintah yang korupsi, 7) Pemerintah tidak transparan saat menggunakan uang pajak, Ningsih dan Pusposari (2014).

### **2.2.2. Variabel Independen**

#### **2.2.2.1. Keadilan**

Keadilan (KD) adalah menurut Banu (2008) dalam Elmiza, Fauziati dan Yunilma (2014) mengatakan keadilan pajak merupakan salah satu asas dalam aturan perpajakan, tetapi dalam hal pelaksanaan hal tersebut sering dianggap masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan. Indikator 1) pembangunan fasilitas umum, 2) digunakan secara baik dan benar, 3) tarif pajak yang rendah, 4) penghasilan tinggi harus membayar pajak yang tinggi, Ningsih dan Pusposari (2014).

#### **2.2.2.2. Sistem Perpajakan**

Sistem Perpajakan (SP) adalah menurut Resikno, Rini dan Novitasari (2014) yaitu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Indikator 1) tidak adilnya sistem perpajakan, 2) tarif pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan, 3) uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana, 4) prosedur pembayaran yang sulit, 5) DJP tidak memberikan sosialisasi untuk kemudahan pembayaran Ningsih dan Pusposari (2014)

#### **2.2.2.3. Kualitas Pelayanan Pajak**

Kualitas Pelayanan Pajak (KPP) adalah Menurut Murni, *et al* (2013) dalam Tobing, (2015) yaitu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak terhadap pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak tergantung kualitas pelayanan petugas pajak. Indikator 1) sarana dan prasarana yang memadai, 2) wajib pajak mudah untuk mendapatkan pelayanan dan penyampaian SPT, 3) Komunikasi yang baik, 4) Bersikap ramah dan sopan, 5)

Kemudahan memperoleh informasi yang belum jelas Ardyaksa (2014) dalam Tobing (2015).

#### **2.2.2.4. Diskriminasi**

Diskriminasi (DS) adalah menurut Nickerson et al. (2009) dalam Ningsih dan Pusposari (2014) menjelaskan pemerintah dikatakan melakukan bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan pihak lain dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku. Indikator 1) Pemerintah melakukan diskriminasi atas agama, ras, dan latar belakang budaya, 2) Pemerintah memenjarakan orang karena pendapat politik, 3) Zakat untuk agama Islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak, 4) Peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 merupakan bentuk diskriminasi Ningsih dan Pusposari (2014).

#### **2.3. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:

$$PEPP = \alpha + b_1KD + b_2SP + b_3KPP + b_4DS + e$$

Keterangan:

|                   |  |
|-------------------|--|
| PEPP              | = persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak |
| $b_1, \dots, b_3$ | = koefisien arah regresi                         |
| KD                | = keadilan                                       |
| SP                | = sistem perpajakan                              |
| KPP               | = kualitas pelayanan pajak                       |
| DS                | = diskriminasi                                   |
| $\alpha$          | = konstanta                                      |
| e                 | = kesalahan pengganggu (standard error)          |

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Uji Asumsi Klasik

Masalah yang umum terjadi dalam model regresi linier berganda yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Maka dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut.

##### 3.1.1. Uji Normalitas

Hasil *Klomogrov-Smirnov* sebesar 0,696 dan signifikan 0,709 lebih besar dari 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi dalam penelitian berdistribusi normal.

##### 3.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*. Berdasarkan hasil uji *glejse* yang dilakukan, nilai probabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05 maka diketahui bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan nilai mutlak residual sehingga menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

##### 3.1.3. Uji Multikolinieritas

Nilai VIF pada hasil uji multikolinieritas model regresi untuk semua variabel independennya kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau 10%. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa pada model regresi bebas dari multikolinieritas.

#### 3.2. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

##### 3.2.1. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa untuk variabel keadilan diperoleh nilai  $t_{hitung} = -0,966$ . Oleh karena itu  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-0,966 < 1,990$  dengan  $P > 0,05$ , maka **H<sub>1</sub> ditolak**, yang berarti bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak pada dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penggunaan uang yang bersumber dari pajak adil atau tidak adil tidak akan berpengaruh terhadap persepsi dosen mengenai etika penggelapan pajak karena pajak sudah menjadi kewajiban seluruh warga negara

yang wajib dibayarkan dan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis.

### **3.2.2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak**

Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa untuk variabel sistem perpajakan diperoleh nilai  $t_{hitung} = -9,049$ . Oleh karena itu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-9,049 > 1,990$  dengan  $P < 0,05$ , maka **H<sub>2</sub> diterima**, yang berarti sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak pada dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan adanya sistem perpajakan yang baik pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila sistem perpajakannya tidak baik pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak.

### **3.2.3. Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak**

Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa untuk variabel kualitas pelayanan pajak diperoleh nilai  $t_{hitung} = -2,090$ . Oleh karena itu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-2,090 > 1,990$  dengan  $P < 0,05$ , maka **H<sub>3</sub> diterima**, yang berarti kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak pada dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wajib pajak telah memberikan kontribusi yang besar kepada negara dengan membayar pajak. Ketika pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah baik dan dapat memenuhi harapan wajib pajak maka wajib pajak akan cenderung patuh membayar pajak, dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Sebaliknya jika wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga wajib pajak memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang legal, etis dan tidak melanggar hukum

maka wajib pajak cenderung akan melakukan kecurangan yaitu penggelapan pajak.

#### **3.2.4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak**

Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa untuk variabel diskriminasi diperoleh nilai  $t_{hitung} = 2,119$  Oleh karena itu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $2,119 > 1,990$  dengan  $P < 0,05$ , maka **H<sub>4</sub> diterima**, yang berarti diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak pada dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan dan adanya zona bebas pajak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada kelompok yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki tarif 1% dengan peredaran bruto dibawah 4,8 milyar dalam satu tahun pajak merupakan bentuk diskriminasi terhadap usaha kecil menengah. Selain itu dalam pernyataan yang dimuat di kuesioner penelitian diskriminasi juga disebabkan adanya perlakuan khusus yang dilakukan pemerintah dengan membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Semakin kuat perlakuan tersebut, maka masyarakat akan menganggap penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis.

### **4. PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

#### 4.2. Keterbatasan

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pada sampel penelitian ini hanya terfokus pada dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2) Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol responden dalam menjawab instrumen penelitian. (3) Penelitian ini menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan diskriminasi, sedangkan masih banyak variabel lain yang diduga mempengaruhi etika atas penggelapan pajak.

#### 4.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk: (1) Pengukuran variabel selain dengan menggunakan kuesioner, perlu diperkuat dengan wawancara sehingga data yang diperoleh dari responden akan lebih valid. (2) Memperluas populasi penelitian, dan memperbanyak sampel penelitian di berbagai Universitas di Surakarta. (3) Menambah variabel-variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams dan Kristanto (2016). *Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga*. Universitas Kristen Satya Wacana, BAKI, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Elmiza, Fauziati dan Yunilma (2014). *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Volume 4 Nomor 1.
- Fickar. (2014). Catatan Hukum tentang Penuntasan Eksekusi Kasus Pajak Asian Agri. Diakses melalui <http://www.kompasiana.com/fickar15/catatan-hukum-tentang-penuntasan-eksekusi-kasus-pajak-asian-agri> Pada 15 oktober 2016
- Handayani dan Cahyonowati (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Diponegoro Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 3, tahun 2014, Hal 1-7.

Handayani Wahyu (2013), "Atribusi" diakses melalui <http://blogwahyu-statistika.blogspot.com/2013/02/pengertian-atribusi-psikologi.html> pada 29 oktober 2016

Indrianto dan Supomo, "Metode Penelitian Bisnis", Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2014

Ningsih dan Pusposari (2014). *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (studi pada mahasiswa jurusan akuntansi)*. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Volume 3 Nomor 1.

Mardiasmo, "Perpajakan Edisi Revisi", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011

Mujiyati dan Aris, "Perpajakan Kontemporer", Penerbit Muhammadiyah University Press (MUP), 2014:1

McGee et,al (2008). *A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States*. Hong Kong Baptist University and Barry University. Journal of Business Ethics.(2008) 77:147-158

Nasikhudinisme . (2015), "Tax Evasion dan Tax Avoidance", diakses melalui <https://nasikhudinisme.com/tag/tax-evasion-dan-tax-avoidance/> pada tanggal 3 Oktober 2016

Puspareni (2012), "Atribusi" diakses melalui <http://puspareni.blogspot.com/2012/05/atribusi.html> pada 1 November 2016

Rachmadi dan Zulaikha (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 2.

Reskino, Rini dan Novitasari (2014). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jurnal InFestasi, Volume 10 No. 1, Hal. 49-63

Suminarsasi dan Supriyadi (2011). *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)*. Tesis. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Magister Sains Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

- Silaen (2015). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Jom FEKON, Volume 2, Nomor 2.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis", Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009
- Sultoni. (2013). PMK 16/PMK.03/2013 *Makin Meneguhkan DJP*. Diakses melalui <http://www.pajak.go.id/content/article/pmk-16pmk032013-makin-meneguhkan-djp> pada 10 Oktober 2016
- Tobing (2015). *Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru. Jom FEKON, Volume 2, Nomor 2 Oktober 2015.
- Ulfa (2015). *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Volume 2 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan.
- Yetmi, Darmayanti, dan Muslim (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bukit Tinggi)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Volume 5 Nomor 1.